

**PRINSIP GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PENYEDIAAN
AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
(PAMSIMAS) DI DESA BANGLAS BARAT KECAMATAN TEBING
TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2014-2016**

Sukarman

Email : nandoarman5@gmail.com

Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293-Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is motivated target PAMSIMAS village election in the village of Banglas Barat years 2014-2016 in accordance with the decree of the minister of public works decree No. 79 / Kpts / DC / 2013 on stipulation district / city target PAMSIMAS. Implementers program PAMSIMAS at the district level conducted by the planning office and the department of public health office of human settlements POKJA AMPL is incorporated in regency Kepulauan Meranti, while implementers at the village level is done by the village government, KKM, SATLAK, BPSPAMS and community facilitator team. The study aims to determine the principles of governance in the management of Banglas Barat PAMSIMAS in the village and the factors that affect the management of PAMSIMAS program. The type used in this research is descriptive research with qualitative research approach. Type of research data is primary data and secondary data. Data collection techniques in this study is documentation and interviews. Technical analysis of the data used is descriptive qualitative data analysis.

The results showed that the principle governance in the management program in the village PAMSIMAS Banglas Barat has not run optimally. It is seen from some of the principles governance of accountability and the rule of law can not be applied by managers BPSPAMS PAMSIMAS particularly in operational and maintenance phase PAMSIMAS assets. inhibiting factor which is greater in terms of both internal and external. The right solution to overcome the problems in the management of PAMSIMAS Village Banglas Barat is particularly BPSPAMS PAMSIMAS manager must be optimized in applying the principles of governance in coordination with all parties involved in the program PAMSIMAS and supported by the budget of the village government and local government.

Keywords: *principles Governance, management PAMSIMAS, and integration*

Pendahuluan

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah), untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan dan menciptakan perilaku hidup bersih melalui promosi kesehatan lingkungan dan penyediaan prasarana / sarana air minum serta sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Dengan tujuan pencapaian target ini dibidang sektor air minum dan sanitasi diharapkan dapat menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar tahun 2019.

PAMSIMAS di mulai pada tahun 2008, dimana sampai tahun 2012 telah berhasil meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 6800 desa/kelurahan yang tersebar di 110 kabupaten. Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi untuk mencapai MDG's, maka program PAMSIMAS dilanjutkan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Program PAMSIMAS II dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan yaitu (1) Air Bersih untuk Rakyat, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Kementerian PU di tunjuk untuk pelaksanaan bidang teknis program PAMSIMAS yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM).

Dalam melakukan percepatan terhadap pencapaian target yang telah ditentukan, salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes RI) No. 852 Tahun 2008 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yang kemudian terus disesuaikan dengan kondisi di masyarakat maka dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Program PAMSIMAS pada tahun 2014 Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan 5 desa yang mendapatkan Program Nasional Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di antaranya desa kudap kecamatan tasik putri puyu, desa banglas barat kecamatan tebing tinggi, desa topang kecamatan rangsang serta desa batang malas dan desa alai selatan kecamatan tebing tinggi barat. Kabupaten Meranti mendapatkan alokasi desa sasaran dari APBN sebanyak 4 desa dan alokasi desa sasaran dari APBD Kabupaten sebanyak 1 desa. Realisasi proyek ini meninjau pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor : 79/KTPS/DC/2013 tentang Penetapan Kabupaten/kota Sasaran Program Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

Desa Banglas Barat salah satu desa yang mendapatkan program PAMSIMAS, dengan sumber dana dari APBN. Dalam identifikasi masalah dan analisis situasi ditemukan data mengenai jumlah penduduk dan akses air minum dan sanitasi awal masyarakat Desa Banglas Barat antara lain:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Dan Akses Terhadap Sanitasi Dan Sarana Air Minum

| No | Dusun | Rumah Tangga (KK) | Rumah Tangga yang mempunyai akses awal (KK) | |
|-------|--------------|-------------------|---|-----------------|
| | | | Air minum | Sarana sanitasi |
| 1 | Rintis | 346 | 245 | 265 |
| 2 | Perumbi | 330 | 353 | 427 |
| 3 | Bandar Suir. | 280 | 98 | - |
| 4 | Semulut | 85 | 23 | - |
| Total | | 1.041 | 719 | 629 |

Sumber: Rencana kerja masyarakat pamsimas, 2014

Kondisi akses air minum dan sanitasi masyarakat masih rendah serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak mengandalkan air hujan dengan PAH (penampungan air hujan) dan kondisi sarana sanitasi masyarakat Desa Banglas masih sangat minim di beberapa dusun untuk itu diperlukan peningkatan.

Pengelolaan PAMSIMAS akan diselenggarakan oleh KKM, Satuan Pelaksana (SATLAK) dan BPSPAMS yang mana sebagai perwakilan masyarakat Desa Banglas Barat. Kegiatan yang dilaksanakan KKM dan SATLAK akan di damping oleh Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) agar setelah program ini selesai masyarakat dapat mandiri dalam mengelola sarana yang dimilikinya

Buang air besar menggunakan WC cemplung dan buang air besar sembarangan adalah salah satu kebiasaan yang masih ada di masyarakat Desa Banglas Barat untuk itu harus dilakukan kegiatan pemicu dengan mengali kesadaran masyarakat untuk berperilaku dan praktik hidup bersih dan sehat (PHBS). Program PAMSIMAS ini

tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana saja tapi pembangunan yang berbasis pada manusia artinya membangun manusia yang ada di Desa Banglas Barat melalui Pelatihan dan Promos sebagai kesehatan (Promkes) yang menjadikan masyarakat sebagai peserta pelatihan. Pelatihan yang dilaksanakan di Desa Banglas Barat antara lain : pelatihan organisasi dan manajemen keuangan, pelatihan teknis, dan pelatihan PHBS, serta promosi kesehatan.

Program PAMSIMAS berupaya untuk lebih meningkatkan jumlah pemanfaat penerima PAMSIMAS ini dengan meningkatkan jumlah penerima manfaat dengan menambah sambungan PVC (Pipa) agar penyakit lingkungan yang berhubungan dengan air seperti diare dapat mengalami penurunan. Masyarakat Desa Banglas Barat dalam program PAMSIMAS dituntut untuk berkontribusi sebesar 20% dari total dana yang disalurkan pemerintah. Kontribusi 20% terdiri dari 4% dana *in cash* (tunai) dan 16% dana sumbangan masyarakat berupa bahan material maupun non materi berupa tenaga (gotong royong). Dana PAMSIMAS di Desa Banglas Barat berasal dari APBN Rp 228.000.000, Kontribusi Masyarakat (*In-Cash*) sebesar Rp 11.400.000 dan Kontribusi Masyarakat (*In-Kind*) 45.600.000 total anggaran Rp 285.000.000.

Desa Banglas Barat memiliki permasalahan yang lebih spesifik dimana sarana air minum dimana sumber air bersih sangat minim, keruh, kering pada musim kemarau dan untuk air bersih hanya berasal dari bak penampungan. Dan dari segi sanitasi masih banyak masyarakat miskin khususnya yang menggunakan jamban sederhana yang bisa dikatakan belum sehat dan perilaku kesehatan masyarakat miskin yang buang air sembarangan, hal ini tentunya merupakan tantangan dalam pelaksanaan PAMSIMAS.

Ditambah dengan kasus penyakit lingkungan yang tinggi dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Kondisi Desa Banglas Barat dengan rendahnya akses sarana air minum dan sanitasi membuat pengelola PAMSIMAS untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan program PAMSIMAS di Banglas Barat diharapkan meningkatkan perilaku hidup sehat, stop buang air besar sembarangan, penguatan bagi pemerintah lokal, akses pelayanan sarana air minum dan sanitasi, namun dari pelaksanaan program PAMSIMAS ini malah menimbulkan permasalahan lain diantaranya :

1. Buruknya pengelolaan sarana PAMSIMAS, setelah beberapa bulan peresmiannya sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat di dusun rintis, yang sulit mendapatkan air karena banyak sambungan PVC di dusun rintis yang rusak dan fasilitas lainnya yang dipastikan tidak bisa digunakan lagi sehingga berdampak pada kebiasaan masyarakat seperti tidak mencuci tangan pakai sabun kembali dilakukan, BABS sehingga kondisi kesehatan masyarakat tidak ada peningkatan kualitas hidup.
2. Kurangnya kegiatan rutin untuk melaksanakan pemantauan tingkat kesadaran sanitasi dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk sekolah yang menjadi sasaran dan masyarakat, serta juga pelatihan organisasi dan manajemen keuangan, pelatihan teknis dimana kegiatan ini hanya dilakukan sekali sehingga tidak berdampak pada kehidupan masyarakat
3. Kecewanya masyarakat akan pengelolaan PAMSIMAS membuat sebagian masyarakat tidak mau membayar iuran sehingga pihak pengelola merugikan dan

mengeluarkan biaya sendiri untuk operasional. Hal ini terlibat dari biaya tagihan listrik dari bulan januari - juli 2015 di tanggung oleh pengelola dengan total pengeluaran Rp 2.150.00

Berdasarkan uraian latar belakang berbagai fenomena penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : *Prinsip Governanve dalam Pengelolaan PAMSIMAS di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti*

Rumusan Masalah

Program PAMSIMAS di Desa Banglas Barat banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat dan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan perilaku hidup sehat, stop buang air besar sembarangan, meningkatkan kelembagaan lokal serta pelayananan air minum dan sanitasi tidak dapat terwujud. Oleh karena itu peran dari pengelola PAMSIMAS sangat penting, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Prinsip *Governance* dalam Pengelolaan PAMSIMAS di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Prinsip *Governance* dalam Pengelolaan PAMSIMAS di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti ?

Kerangka Teori

1. Teori Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Konsep *governance* merujuk pada institusi, proses, dan tradisi yang menentukan bagaimana kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat, dan suara warga di dengar.

Menurut Bhatta di dalam syakrani memaparkan bahwa terdapat empat prinsip utama di dalam *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan rule of law. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap individu maupun secara organisatoris kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan atas pengelolaan sumber daya, dana, dan seluruh unsur kinerja yang diamanatkan kepada mereka. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Partisipasi (*participation*) merupakan prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan disetiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Sedangkan rule of law sebagai kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan terutama hak asasi manusia

2. Teori Integrasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “integrasi” sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan. Kata “kesatuan”

mengisyaratkan berbagai macam elemen yang berbeda satu sama lain mengalami proses pembauran. Jika pembauran telah mencapai suatu perhimpunan, maka gejala perubahan ini dinamai integrasi

Menurut Emile Durkheim (Soerjono Soekanto) dalam studi tentang integrasi sosial menjelaskan bahwa integrasi sosial dapat terwujud jika terjadi saling ketergantungan antara bagian yang terspesialisasikan. Dalam hal ini solidaritas didasarkan atas kesamaan dalam kepercayaan dan nilai saling tergantung secara fungsional dalam masyarakat yang heterogen. Kesamaan dalam kepercayaan dan nilai ini akan memberi kesadaran kolektif untuk menciptakan kesatuan. Durkheim membedakan integrasi sosial atas dua kategori. *Pertama*, integrasi normatif dalam perspektif budaya. Integrasi ini menekankan solidaritas mekanik yang terbentuk melalui nilai dan kepercayaan membimbing masyarakat dalam mencapai sukses. *Kedua*, integrasi fungsional dengan menekankan pada solidaritas organik, yaitu solidaritas yang terbentuk melalui relasi saling tergantung antara bagian atau unsur yang tergantung dalam masyarakat.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data dikumpulkan, dianalisis, dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada, kemudian akan diolah dengan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang menggambarkan secara rinci dan sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Analisis data kualitatif fokusnya pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data. Dengan demikian analisa data dalam penelitian ini menemukan pengelolaan yang dilakukan dalam program PAMSIMAS di Desa Banglas Barat.

HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan Program PAMSIMAS di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Latar Belakang Program PAMSIAMS di Kabupaten Kepulauan Meranti

Pelaksanaan program PAMSIMAS tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Bupati sebagai penanggung jawab pelaksanaan PAMSIMAS, sesuai dengan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 14/HK/KPTS/I/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 164 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kelompok Kerja ini disebut POKJA AMPL.

Pengambilan keputusan dalam program PAMSIMAS di tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti melibatkan beberapa lembaga instansi Pemerintah, yakni BAPPEDA, Dinas Kesehatan dan Dinas PU Cipta Karya. Program PAMSIMAS di tingkat desa memiliki beberapa tahap mulai dari tahap seleksi desa, perencanaan, pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan. Desa Banglas Barat salah satu desa sasaran program PAMSIMAS yang mana kondisi sarana akan akses pelayanan air minum dan sanitasi yang masih sangat rendah. Beberapa tahap program PAMSIMAS di Desa Banglas Barat antar lain :

a. Tahap perencanaan program PAMSIMAS

Tahap awal penyiapan masyarakat untuk mengetahui kondisi riil masalah-masalah yang dihadapi dalam akses air minum dan sanitasi, menyiapkan lembaga

pengelola yang dipercaya masyarakat melalui rebug warga dilakukan secara musyawarah, menyusun rencana kerja masyarakat sebagai program bersama. Adapun tahapan perencanaan tersebut terdiri dari :

1. Identifikasi masalah dan analisis situasi
2. Pemicuan perubahan perilaku
3. Pembentukan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) dan Satuan Pelaksanaan (SATLAK) Program PAMSIMAS
4. Pengumpulan kontribusi
5. Penyusunan RKM dan verifikasi RKM

b. Tahap Pelaksanaan program PAMSIMAS

Pelaksanaan program PAMSIMAS di Desa Banglas Barat melibatkan banyak pihak. Pada tahap pelaksanaan dilakukan proses pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berasal dari APBN dilakukan penyaluran dana melalui tiga tahapan, tahapan I 20% tahap II 40% dan tahap III 40%. Dana hibah ini disalurkan melalui nomor Rekening 01710-01-008635-531 atas nama KKM Tirta Lestari Desa Banglas Barat.

Pembangunan sarana yang dilakukan berupa pengerjaan tower air PAMSIMAS setinggi delapan meter dan pengeboran sumur bor untuk dua titik yang dilakukan oleh tukang yang dibantu masyarakat, pembangunan sarana kran umum sebanyak empat buah dan pembangunan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di sekolah SDN 16 Banglas Barat. Pembangunan sarana PAMSIMAS dilakukan secara bertahap-tahap sesuai dengan dana BLM dari APBN yang diterima oleh pihak KKM.

Proses pemasangan perpipaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPSPAMS dan pada tahun 2014 dan telah ada sekitar 280 KK yang mendaftar sebagai pemanfaat dari program PAMSIMAS. pelaksanaan pembangunan sarana PAMSIMAS, pelatihan kelembagaan pengelola dan pelatihan masyarakat maka dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan/ uji fungsi serah terima pengelolaan kegiatan dari KKM kepada BPSPAMS yang dihadiri Pemerintah Desa, TFM, dan perwakilan dari POKJA AMPL tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti.

c. Tahap Operasional dan Pemeliharaan

Program PAMSIMAS mulai beroperasi pada tahun 2015 dengan dilakukannya peresmian pada sarana PAMSIMAS. Iuran masyarakat dalam program PAMSIMAS pada tahun 2015 berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan pihak BPSPAMS dimana perbulannya masyarakat diwajibkan membayar Rp.10.000/KK. Namun didalam pengoperasian program PAMSIMAS tahun 2015 tidak berjalan secara optimal. hal ini disebabkan masyarakat tidak mau membayar iuran dari air yang telah di distribusikan karena masyarakat tidak mendapatkan air secara merata.

Kerusakan juga terjadi pada sarana perpipaan PAMSIMAS, hal ini disebabkan karena dampak dari kegiatan proyek peningkatan jalan di Desa Banglas Barat dan dari pengelola sendiri tidak melakukan pemeliharaan dan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan mengenai jalur perpipaan air PAMSIMAS.

Tahun 2016 program PAMSIMAS kembali dilanjutkan dengan melakukan revitalisasi pada keanggotaan BPSPAMS dikarenakan ketidakaktifan keanggotaan yang lama. Pada awal kepengurusan BPSPAMS telah melakukan rebus warga

dengan pemanfaat PAMSIMAS yang aktif dalam program PAMSIMAS, dimana telah dilakukan penetapan bahwa masyarakat setuju untuk penerapan meteran air dengan biaya Rp.100.000 yang diangsur selama 2 bulan dan besaran iuran Rp. 3000/M³ pemakaian air. Hingga saat ini jumlah pengguna atau konsumen dari program Pamsimas ini berjumlah 54 KK.

Kegiatan pemeliharaan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Namun sampai saat ini Desa Banglas Barat belum meningkatkan kondisi hidup bersih dan sehat dimasyarakat dikarenakan rencana kegiatan tersebut tidak terlaksana. Hal ini didukung data desa sasaran PAMSIMAS dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa Desa Banglas belum Stop BABS atau ODF.

2. Prinsip Governance dalam Pengelolaan Program PAMSIMAS

a. Partisipasi

Penerapan prinsip partisipasi dalam pengelolaan program PAMSIMAS di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti sudah cukup optimal, karena masyarakat telah terlibat secara langsung dalam proses penyusunan program kebijakan maupun pelaksanaan dan masyarakat bersama-sama membentuk kelembagaan masyarakat

Masyarakat mulai ikut peduli terhadap kondisi yang dihadapi dan mulai ikut serta dalam rebus warga membentuk unit-unit lembaga pengelolaan program PAMSIMAS yakni KKM, SATLAK, dan BPSPAMS. Masyarakat juga ikut dan hadir dalam kegiatan program PAMSIMAS seperti kegiatan hasil identifikasi masalah dan analisis situasi, pemilihan opsi teknis,

pelatihan, dan kesehatan, Membahas RKM, Pelatihan BPSPAMS, Pelatihan Teknik, Pelatihan Administrarasi dan Keuangan, dan Pelaksanaan CLTS dan STBM.

Tahun 2016 Masyarakat sudah kembali memberikan sumbangan atas fasilitas air bersih yang telah digunakan dari program PAMSIMAS. hal ini dikarenakan anggota BPSPAMS yang baru telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

b. Transparansi

Program PAMSIMAS merupakan program yang berbasis masyarakat dimana masyarakat yang berperan penting dalam pengelolaannya. Awal program PAMSIMAS di Desa Banglas Barat dinilai sudah cukup optimal dimana telah adanya keterbukaan dari pemerintah daerah dengan melakukan sosialisasi program PAMSIMAS, masyarakat yang menerima progam ini membuat Surat Pernyataan Minat Keikutsertaan dalam PAMSIMAS (SPMKP).

Awal program PAMSIMAS telah diadakannya sosialisasi, dan dalam setiap tahapan program PAMSIMAS turut melibatkan masyarakat artinya keterbukaan dalam hal informasi mengenai program diketahui masyarakat. Dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program PAMSIMAS telah melakukan sosialisasi mengenai pembangunan sarana, dan pelatihan-pelatihan.

Pengelolaan program PAMSIMAS yang ada di Desa Banglas Barat seperti dalam penyusunan dan pencairan dana RKM yang dilakukan oleh KKM, SATLAK, BPSPAMS dan bersama masyarakat. Telah dilakukannya rincian kegiatan dan penggunaan dana yang total nya Rp. 285.000.000.

c. Akuntabilitas

Pengelola program PAMSIMAS di Desa Banglas Barat pada tahapan operasional dan pemeliharaan dari tahun 2015-2016 belum menerapkan prinsip akuntabilitas sehingga prinsip ini belum berjalan secara optimal. Setelah serah terima aset PAMSIMAS ke BPSPAMS, memang tidak ada lagi laporan dari BPSPAMS sebagai pengelola program PAMSIMAS tentang kegiatan-kegiatan baik kepada BPD maupun Pemerintah Desa. Pihak BPSPAMS sendiri tidak melakukan tanggungjawabnya menjaga aset masyarakat dimana banyak perpipaian rusak dan berakibat pelayanan air bersih kemasyarakat terputus dan hanya satu kran umum yang berfungsi dari total keseluruhan kran yaitu empat

Pada tahun 2015 anggota dari pengelola BPSPAMS tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, karena dalam hal ini yang aktif menjalankan tugas hanya ketua dan bendahara saja. Sehingga pada tahun 2016 anggota lama direvitalisasi karena ketidak aktifannya, dan kini anggota yang baru hanya menempati posisi ketua, sekretaris dan bendahara. Hal ini membuktikan bahwa pengelola PAMSIMAS belum bisa menjalankan prinsip akuntabilitas secara maksimal terhadap tujuan dari program PAMSIMAS.

d. Kepastian Hukum (Rule of Law)

Dalam pengelolaan PAMSIMAS yang dilakukan oleh BPSPAMS di Desa Banglas Barat, telah terbentuk sebuah peraturan bersama antara pihak BPSPAMS selaku pengelola dengan masyarakat yang menjadi pemanfaat program PAMSIMAS. Namun Pihak pengelola BPSPAMS tidak mampu menerapkan peraturan tersebut, hal ini menunjukkan masih belum optimal prinsip kepastian hukum dalam pengelolaan PAMSIMAS. Hal ini di sebabkan jumlah dari pengelola yang minim dan tidak adanya

instrumen pendukung dalam penerapan sanksi, terlebih lagi pemanfaat PAMSIMAS warga tempatan jadi meminimalisir terjadinya konflik sehingga pihak BPSPAMS hanya melakukan teguran lisan.

3. Integrasi Masyarakat dalam Pengelolaan PAMSIMAS

Berkaitan dengan Pengelolaan PAMSIMAS di Desa Banglas Barat telah timbul rasa kesadaran masyarakat akan kebutuhan rasa bersamaan. Hal ini ditunjukkan masyarakat melalui pelaksanaan program PAMSIMAS dimana masyarakat ikut serta dalam menyusun kebijakan PAMSIMAS dan mau bergotong royong memasang jaringan perpipaan.

Besarnya rasa kepedulian masyarakat untuk segera terealisasinya program PAMSIMAS, sehingga masyarakat bersamasama memberikan bantuan baik materi maupun non materi. Masyarakat Desa Banglas Barat juga rela mewakafkan sebidang tanah ukuran 5 x 5 Meter persegi untuk membangun kran umum PAMSIMAS, dimana total dari kran umum sebanyak empat buah. Masyarakat yang telah mewakafkan tanahnya tidak ada tindakan menguasai dari pembangunan kran umum dan air bersih yang dialirkan, dan mereka menyadari bahwa hal itu untuk kepentingan bersama.

Terbentuknya kelembagaan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat yakni keterbatasan akses air bersih dan perilaku hidup sehat sehingga melalui program PAMSIMAS diharapkan dapat terjadinya perubahan kondisi taraf hidup masyarakat. Upaya dari masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan melakukan rebug warga, walaupun terdapat perbedaan pendapat dan pertentangan untuk mencari pemecahan masalah tetapi dapat dilakukan melalui koordinasi antar masyarakat agar

terjalin kerja sama sehingga membentuk sebuah kebudayaan yang lebih baik seperti sikap gotong royong.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prinsip *Governance* dalam Pengelola PAMSIMAS di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yakni faktor pendukung keberhasilan program atau faktor penghambat yang mengakibatkan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Memahami faktor-faktor tersebut dari segi faktor Internal dan faktor Eksternal, di dalam pengelolaan program PAMSIMAS meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan.

Faktor internal adalah faktor-faktor yang ada di dalam lembaga pengelola program PAMSIMAS yang berjenjang mulai dari tingkat daerah sampai ketingkat kelembagaan masyarakat desa terdiri dari POKJA AMPL Kabuapten Kepulauan Meranti, Tim Fasilitator Masyarakat, Pemerintah Desa Banglas Barat, KKM, SATLAK, dan BPSPAMS. Dilihat dari segi struktur, tupoksi dan kapasitas dari pengelola dalam melaksanakan program PAMSIMAS.

Sedangkan faktor-faktor yang ada di luar pengelola PAMSIMAS yakni kondisi masyarakat sebagai sasaran pemanfaat program PAMSIMAS dan anggaran di dalam pengelolaan serta fasilitas yang mempengaruhi pengelolaan PAMSIMAS.

1. Faktor Pendukung a. Faktor Internal

Yakni Pengelolaan PAMSIMAS dilakukan secara terstruktur dan saling berkoordinasi antar lembaga. Hal ini dapat

dilihat baik dari pihak Pemerintah daerah maupun pelaksanaan ditingkat masyarakat terdiri dari POKJA AMPL, Pemerintah Desa, TFM, KKM, SATLAK dan BPSPAMS berdasarkan runtutan tahapan program mulai dari tahap seleksi desa sampai tahap pelaksanaan. Serta perannya dalam merencanakan, menyusun, dan melaksanakan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) berdasarkan identifikasi masalah dan analisis situasi terhadap kondisi di Desa Banglas Barat

b. Faktor Eksternal

Yakni Sikap gotong royong masyarakat yang telah terbentuk sejak dulu artinya masyarakat turut membantu dalam pelaksanaan program dengan ikut dalam memasang jaringan perpipaan ke rumah-rumah masyarakat pemanfaat. Dan Kepedulian masyarakat mengenai program PAMSIMAS sehingga mereka ikut dalam rebusan warga, pembentukan lembaga pengelola dan ikut melaksanakannya.

Adanya dukungan masyarakat dengan berdasarkan adanya kontribusi masyarakat 20% terdiri dari 4% dana *in cash* (tunai) dan 16% *in kind* (sumbangan materil dan tenaga). Berkaitan dengan iuran, masyarakat tidak keberatan dengan besarnya jumlah iuran yang dibebankan kepada mereka, asalkan pendistribusian air merata kepada masyarakat.

2. Faktor Penghambat

a. Faktor Internal

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat Pengelolaan program PAMSIMAS di Desa Banglas Barat antara lain:

1. Keterbatasan kapasitas dan kurangnya komitmen dari Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS)

Struktur anggota pengelola BPSPAMS yang dibentuk tahun 2014 terdapat 6 orang yang menjalankan tupoksinya namun tahap operasional dan pemeliharaan tahun 2015 hanya terdapat 2 orang hal ini dikarenakan pengelola BPSPAMS yang lainnya tidak mau menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dikarenakan tidak ada penghasilan yang tetap sehingga tahun 2016 direvitalisasi, anggota pengelola BPSPAMS yang saat ini berjumlah 3 orang yakni ketua, sekretaris dan bendahara.

2. Minimnya pelatihan-pelatihan bagi Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS)

Pelatihan yang berkelanjutan secara formal melibatkan anggota pengelola secara keseluruhan masih minim dilakukan, bentuk pendampingan yang diberikan setelah program PAMSIMAS lebih berupa diskusi-diskusi kecil.

b. Faktor Eksternal

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat Pengelolaan program PAMSIMAS di Desa Banglas Barat antara lain:

1. Minimnya anggaran bagi pengelola PAMSIMAS

Sumber dana dalam program PAMSIMAS paling besar berasal dari APBN, pada tahun 2014 pengelola PAMSIMAS mendapatkan dana sebesar Rp.228.000.000 atau 80% dari total dana program PAMSIMAS namun pada tahap operasional dan pemeliharaan pada tahun 2015-2016 tidak ada lagi bantuan yang diterima pengelola khususnya BPSPAMS

2. Kurang kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat

Hal ini dikarenakan beberapa dusun yang berdekatan dengan pinggir sungai masih ada masyarakat yang BABS dan tidak menerapkan cuci tangan pakai sabun serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat di dalam rumah tangga.

3. Banyaknya fasilitas yang rusak

program PAMSIMAS di Desa Banglas Barat sering rusaknya mesin pompa air sebanyak 5 buah dan selama pengelolaan PAMSIMAS kondisi jaringan perpipaan sepanjang 1940 meter rusak akibat proyek pengembangan jalan serta tiga buah kram umum tidak berfungsi lagi. Kerusakan sarana PAMSIMAS secara detail lebih banyak lagi seperti aksesoris pipa sehingga mengganggu berjalannya program PAMSIMAS.

4. Kualitas sumber air baku masih belum termasuk kategori air bersih

kondisi sumber air baku dalam pengelolaan PAMSIMAS masih belum termasuk kategori baik untuk itu perlu adanya pengolahan untuk mencapai kategori air bersih. Kondisi geografis Desa Banglas Barat yang berdekatan dengan pinggir sungai daerah kepulauan menjadi salah satu penyebab sulitnya mendapatkan sumber air baku yang bagus.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan mengenai Prinsip *Governance* dalam Pengelolaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014-2016,

peneliti dapat menyimpulkan bahwa prinsip *governance* dalam pengelolaan PAMSIMAS belum dapat dikatakan berhasil atau berjalan optimal. Hal ini terlihat dari pengelolaan PAMSIMAS Penerapan prinsip *governance* yang akuntabilitas dan kepastian hukum masih belum optimal dan faktor penghambat lebih besar perannya dalam pengelolaan PAMSIMAS, yakni dari segi internal terbatasnya kapasitas dan minim pelatihan-pelatihan bagi pengelola BPSPAMS. Sedangkan dari segi eksternal minim anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat, fasilitas sarana yang rusak serta kualitas sumber air baku yang belum termasuk kategori air bersih..

2. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Diperlukannya sikap komitmen dan bertanggung jawab dari pengelola BPSPAMS, dan adanya aturan atau sanksi yang jelas dalam pengelolaan program PAMSIMAS agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik
2. Perlu adanya dukungan dari segi anggaran untuk pengelola PAMSIMAS baik dari Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Desa, sehingga sarana PAMSIMAS yang rusak dapat diperbaiki dan bisa meningkatkan jumlah pemanfaat PAMSIMAS.
3. Kepada masyarakat diharapkan dapat menjaga dan merawat fasilitas yang telah disediakan serta mau ikut serta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat agar melalui PAMSIMAS dapat menunjang kesejahteraan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

Achmad, 2011. *Konsep dan Implementasi Good Governance serta Pemberdayaan menuju Kabupaten Terbaik di Provinsi Riau*. Rokan Hulu

Depdikbud, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Dwiyanto, Agus, 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Jakarta : Gajah Mada Universitas Pres

Hetifa, Sumarto, 2003. *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia

Kaho J.R, 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Raja Wali Pers

Patiliman, Hamid, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Sedarmayanti, 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju

Soekanto, soerjono, 2011. *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*. Jakarta: Rajawali

—————, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Syakrani, 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Strauss, Anselm & Corbin Juliet. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Thoha Mifthah, 2003. *Birokrasi dan politik indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Widodo, Joko, 2001. *Good Governance: Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia

2. Peraturan perundang-undangan :

Peraturan Menteri Kesehatan No 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang *Persyaratan Kualitas Air Minum*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 *Tentang Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM)*

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2015 *Tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti*

Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 14/HK/KPTS/I/2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 164 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja program Air Minum dan Lenyehatan Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti*